



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI JAWA TIMUR

*

**

**

*

JAKARTA 2023



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI JAWA TIMUR
21-25 OKTOBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Julil 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 21 Agustus 2023.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI, diantaranya:

1. Meninjau secara langsung pengelolaan Kebun Raya Mangrove Kota Surabaya;
2. Meninjau secara langsung Kantor Balai Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I; dan
3. Meninjau Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) dan mendengarkan peningkatan produksi hewan ternak yang berkualitas dan bebas penyakit dalam mendukung pemenuhan pangan berbasis protein.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 21-25 Oktober 2023.

B. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.803,49 Km². Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km² atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 20,21 Km² setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu lintas perekonomian Indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan. Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan

Penduduk Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2020) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,8 juta jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 40,9 juta jiwa pada tahun 2021 dengan sex ratio sebesar

99,56 persen. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki

Potensi Wilayah Jawa Timur

Jawa Timur memiliki potensi wilayah yang sangat besar, diberbagai bidang, berdasarkan Data BPS Tahun 2021, menunjukkan angka Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur terus naik secara konsisten, yaitu pada angka 2,75% (2019), 2,68% (2020), dan 3,23% (2021).

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat perdesaan, baik sebagai pelaku usaha tani (petani pemilik lahan) maupun buruh tani. Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019, 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, LBS : 7 463 948 Ha.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu produsen utama komoditas tanaman pangan khususnya Padi dan Jagung. Pada tahun 2021 produksi padi Provinsi Jawa Timur mencapai 9,91 juta ton dengan produktivitas 56,47 kuintal per hektar. Untuk tanaman Jagung dan Kedelai, pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur tercatat jumlah produksinya sebesar 6.131,16 ribu ton jagung dan 345,0 ribu ton kedelai.

Sedangkan untuk tanaman hortikultura yang mencakup tanaman produsen buah, sayur, bunga, bumbu masak, dan biofarmaka. Pada tahun 2021 produksi komoditas bumbu masak (bawang daun, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, dan paprika) di Jawa Timur sebesar 13.610.566 ton, untuk komoditas sayur (bayam, buncis, jamur, kacang panjang, kangkung, kol, timun, kubis, labusiam, lobak, sawi, terong, tomat, wortel) sebesar 7.422.355 ton, dan komoditas buah-buahan (melon, semangka, stroberi) sebesar 1.970.131 ton. Produksi tanaman sayuran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 untuk tanaman bawang merah, cabai, kentang, tomat, bawang putih berturut-turut sebesar 473,62 ribu ton, 127,37 ribu ton, 324,25 ribu ton, 93,12 ribu ton, dan 3,77 ribu ton.

Kemudian pada sektor perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing

berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: pertama: Perkebunan tanaman semusim seperti tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen; kedua, Perkebunan tanaman tahunan, seperti kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.

Sedangkan pada sektor peternakan Jawa Timur mempunyai potensi yang signifikan, selain keadaan lingkungan yang mendukung juga didukung budaya masyarakat dalam bertani secara umum termasuk beternak. Pada tahun 2021 populasi sapi potong di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.933,45 ribu ekor dengan produksi dagingnya sebesar 108,32 ribu ton. Untuk Produksi telur ayam petelur tercatat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur sebesar 513,67 ribu ton.

Sektor perikanan Jawa Timur sangat tinggi. Banyak terdapat Ikan pelagis besar maupun kecil yang biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Ikan pelagis kecil tersebut adalah Ikan Selar dan Sunglir, Klupeid Teri, Japuh, Tembang, Lemuru dan Siro, serta kelompok Scrombroid seperti Kembung dan lain-lain, ditangkap menggunakan jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkaran, pukat cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Untuk Ikan pelagis besar seperti kelompok Ikan Tuna dan Cakalang, kelompok Marlin, kelompok Tongkol dan Tenggiri, dan cucut, ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (*pole and line*) serta rawai (*longline*). Sementara Ikan demersal, yaitu jenis ikan yang habitatnya di bagian dasar perairan, ditangkap dengan menggunakan jaring insang dasar (*gillnet*), rawai dasar (*long line*), bubu, seperti ikan kakap merah/bambangan, peperek, tiga waja, bawal dan lain-lain. Potensi perikanan budidaya di Jawa Timur juga sangat prospek, dari 22 Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir, 151 Kecamatan berwilayah pesisir, hampir seluruh wilayah nya terutama

Kabupaten, memiliki wilayah budidaya perikanan, baik di wilayah laut lepas maupun di Perairan Umum Daratan (PUD) yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya.

Provinsi Jawa Timur memiliki 22 Kabupaten dan Kota yang memiliki karakteristik wilayah pesisir, yang terdiri atas 151 Kecamatan berkarakter pesisir (memiliki wilayah pantai laut) dengan jumlah pulau kecil sebanyak 427 pulau, termasuk 3 pulau terluar (Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Peneken).

Selain potensi ikan Jawa Timur juga memiliki potens produksi garam yang sangat tinggi cenderung stabil dan meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Pemenuhan garam untuk konsumsi dan industri dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri yang dilakukan di Pulau Madura yaitu pada Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep berhasil menjadi 10 besar Kabupaten penghasil garam di Indonesia yang memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 65% setiap tahun, sehingga menjadi bagian dari Roadmap Program Swasembada Garam Nasional sejak tahun 2010.

Sektor Kehutanan Jawa Timur selain memproduksi benih, bibit, kayu bulat juga memproduksi hasil hutan lainnya untuk kepentingan konsumsi masyarakat, industri maupun ekspor. Hutan Jawa Timur juga mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, ekosistem, formasi biota tertentu, konservasi jenis satwa tertentu yang menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi menarik, indah alamiah yang terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk, sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga. Hutan secara umum lebih dikenal sebagai penghasil kayu dan non kayu jenisnya sangat beragam yang tersebar pada kawasan hutan di Jawa Timur. Hasil Hutan Non Kayu merupakan sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Non Kayu bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Sasarannya adalah 1.957 desa di Jawa Timur yang tersebar di sekitar kawasan hutan Negara, dimana

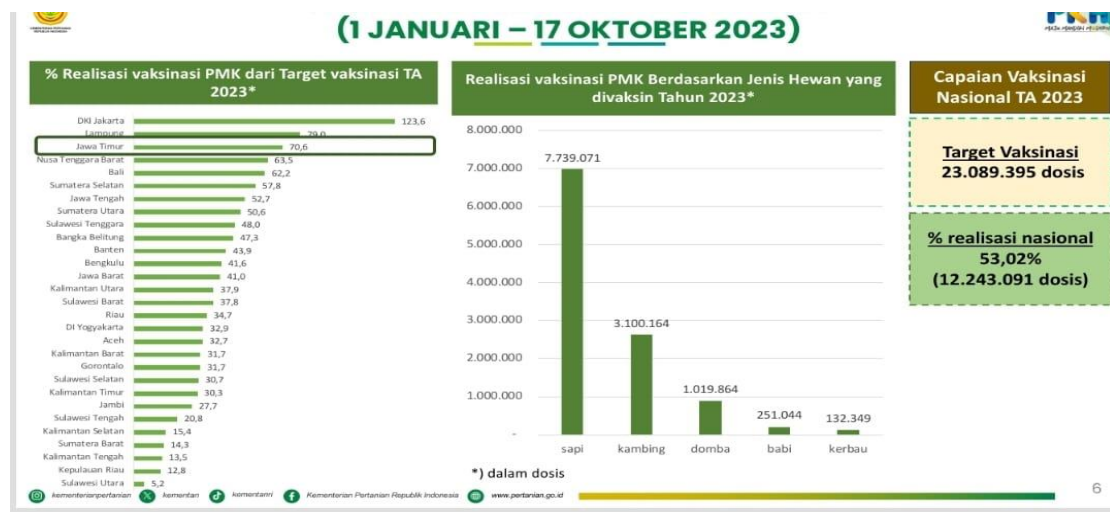
lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar hutan tersebut memiliki interaksi yang cukup tinggi dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan

Laporan Perkembangan Penanganan Penyakit Pada Hewan

Distribusi Spatial Kejadian PMK (Update 5 Oktober 2023)

1. Kasus terkonfirmasi PMK periode 1-20 Okt 2023 di laporkan di 8 kab/kota dari 5 provinsi yaitu DIY, Jateng, Jatim, Riau, dan Sulsel (26 kejadian, 36 kasus)
2. Puncak Kasus pada Juni 2022, mulai Juli 2022 melandai.
3. Vaksinasi PMK dimulai sejak 14 Juni 2023.
4. Tahun 2023 kejadian dan kasus berkurang cukup signifikan dibanding tahun 2022.

Vaksinasi PMK Nasional Ta. 2023 (1 Januari – 17 Oktober 2023)



Tantangan Vaksinasi-General

1. Jumlah populasi ternak tidak sesuai dengan data populasi statistik yang existing
2. Situasi Kasus melandai, ada keengganan peternak untuk vaksinasi
3. Penandaan ternak yang sudah divaksin belum optimal (blm semua ternak terpasang *eartag*, *eartag* rusak, data *eartag* tidak terintegrasi ke isikhnas)
4. Keterbatasan jumlah SDM (petugas lapang) dengan berbagai kegiatan lain selain vaksinasi PMK

Jumlah Ternak Sakit, Sembuh, Potong, Mati Akibat PMK Per Tahun

Tahun	Jumlah sakit	Jumlah mati	Jumlah potong	Jumlah sembuh	Jumlah Masih Sakit
2022	591.396	10.611	14.026	541.179	25.580
2023	23.672	1.114	533	17.139	4.886

Jumlah Ternak Sakit, Sembuh, Potong, Mati Akibat PMK Per Tahun Per Provinsi

Provinsi	sakit	mati	dipotong	sembuh	Masih saki
Bangka Belitung	215	-	-	193	22
Banten	59	-	1	32	26
Bengkulu	113	-	-	110	3
Di Yogyakarta	1,549	109	41	934	465
Dki Jakarta	4	-	4	-	-
Jambi	45	-	-	37	8
Jawa Barat	2,740	49	83	2,055	553
Jawa Tengah	4,929	326	167	1,649	2,787
Jawa Timur	7,823	449	224	7,049	101
Kalimantan Barat	25	-	1	20	4
Nusa Tenggara Barat	229	-	-	229	-
Riau	248	1	8	214	25
Sulawesi Barat	18	-	-	-	18
Sulawesi Selatan	134	-	-	80	54
Sulawesi Tengah	4,577	178	1	4,246	152
Sulawesi Tenggara	3	-	-	-	3
Sumatera Barat	961	2	3	291	665
Grand Total	23,672	1,114	533	17,139	4,886

Perkembangan dan Situasi Penanganan Lsd

Alokasi Vaksinasi LSD 2023

Total (Dosis)	Total Distribusi (Dosis)	Stok Pusat (Dosis)	Sumber Dana	Keterangan
1.000.000	499.090	910	Hibah Australia	500.000 dosis proses pengadaan
75.000	2.000	73.000	APBN	

Distribusi Vaksin LSD 2022 & 2023 (Update 19 Oktober 2023)

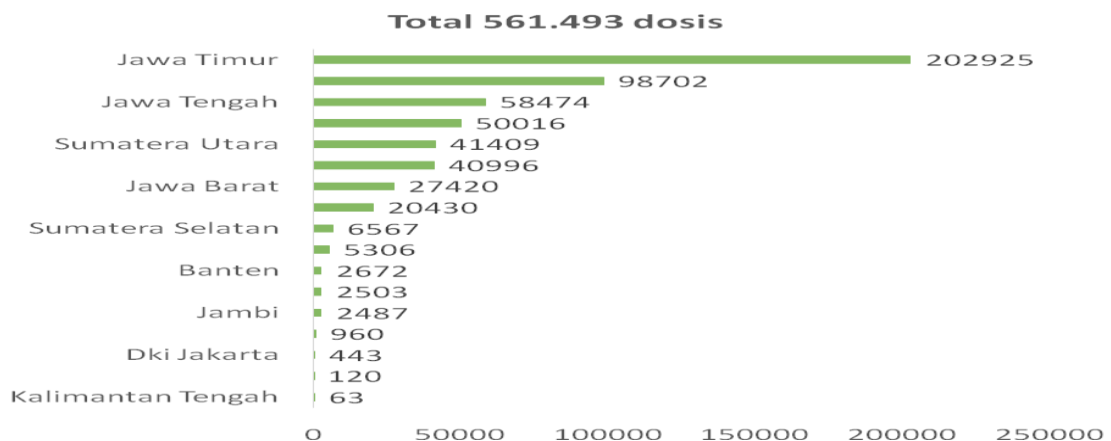
No	Provinsi	2022	2023
1.	Aceh	70.000	0
2.	Sumatera Utara	25.000	0
3.	Sumatera Barat	50.000	20.000
4.	Jambi	3.000	4.200
5.	Riau	67.500	
6.	Sumatera Selatan	10.000	10.000
7.	Lampung	1.000	110.000
8.	Banten	800	10.000
9.	DKI Jakarta		1.540
10	Jawa Barat	30.000	60.000
11	Jawa Tengah	36.500	70.000
12	DI Yogyakarta	3.000	10.000
13	Jawa Timur	150.000	170.000
14	Bengkulu	0	20.000
15	Kep. Bangka Belitung	0	5.000
16	Kalimantan Tengah	0	2.500
17	Kalimantan Selatan	0	2.000

No	UPT	2022	2023
1.	BPTUHPT Padang Mangatas	1.260	1.000
2.	BPTUHPT Sembawa	700	700
3.	BBIB Singosari	400	0
4.	BPTUHPT Indrapuri	0	1.300
5.	BIB Lembang	0	300
6.	BPSI Ciawi	0	200

7.	BBPTUHPT Baturraden	0	2.000
8.	BPTU Pelaihari	0	360
Total		449.160	501.100

Perkembangan Vaksinasi LSD Nasional (Update 19 Oktober 2023)

Realisasi Vaksinasi LSD (s.d. 19/10/2023)



Note:

- Vaksinasi dimulai Maret 2022 khusus wilayah Riau. NAD. Sumut.
- Wilayah Lainnya Sebagian Sumatera dan P. Jawa dimulai September 2022

Capaian Vaksinasi Nasional

- Populasi sapi dan kerbau di prov tertular (Statistik 2021) 12.145.990 ekor
- Total Vaksin 1.524.160 dosis
- Vaksin terdistribusi 950.260 dosis (62%)
- Total realisasi vaksinasi 561.493 dosis
- % realisasi dari distribusi 59%

Jenis Vaksin PMK

Daftar vaksin PMK yang terlampir dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS/PK.300/M/11/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 738/KPTS/PK.300/M/10/2022 tentang Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (Foot-and-Mouth Disease)

No.	Nama Produk	Jenis Vaksin (Platform)	Negara Asal
1.	Aftopor®	Vaksin inaktif Serotype O dan Serotype A (strain O-3039, O1 Manisa dan Strain A22 IRAQ)	Perancis
2.	CAVac FMD	Vaksin inaktif Serotype O (strain O/Mya98/XJ/2010 dan strain O/GX/9-7)	Republik Rakyat Tiongkok
3.	Aftomune®	Vaksin inaktif Serotype O dan Serotype A (Strain O ₁ Campos dan Strain A ₂₄ Cruzeiro)	Brazil
4.	Aftogen® Oleo	Vaksin inaktif Serotype O (strain O ₁ Campos)	Argentina
5.	Aftosa	Vaksin inaktif Serotype O dan Serotype A (strain O ₁ Campos dan strain A ₂₄ Cruzeiro)	Argentina
6.	Raksha Ovac Monovalent	Vaksin inaktif Serotype O (Strain O1 Manisa)	India
7.	Schelkovo FMD Monovalent Vaccine	Vaksin inaktif Serotype O (Strain O/TUR/2009)	Rusia
8.	DECIVAC FMD DOE	Vaksin inaktif Serotype O (Strain O/TUR/5/09)	Jerman
9.	Monovalent FUTVAC Foot and Mouth Disease Vaccine Inactivated	Vaksin inaktif Serotype O (Strain IND/O/R2/75)	India
10.	Aftovacin Oleosa	Vaksin inaktif Serotype O dan Serotype A (Strain O1 Campos dan Strain A24 Cruzeiro)	Brazil
11.	Ourovac@ Aftosa	Vaksin inaktif Serotgpe O dan A (Strain O1 Campos dan A24 Cruzeiro)	Brazil
12.	Inactivated adsorbed monovalent vaccine against type O/MESA/Ind-2001, Foot-and-Mouth Disease	Vaksin inaktif Serotype O (Strain O/Zabalkalsky/2016)	Rusia

Resume Pengendalian Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) di Jawa Timur

Tenaga Kesehatan Hewan Mendukung Pengendalian PMK di Jawa Timur:

1. Dokter Hewan

Tersedia Dokter Hewan Pemerintah sebanyak 950 orang yang tersebar di 38 Kab/kota

2. Paramedik Veteriner

Tersedia Paramedik Veteriner Pemerintah sebanyak 1.500 orang yang tersebar di 38 Kab/kota

3. Nakes Non Pemerintah

- a. Fakultas Kedokteran Hewan Unair Surabaya
- b. Fakultas Kedokteran Hewan Unibraw Malang
- c. Fakultas Kedokteran Hewan Univ Wijaya Kusuma Surabaya
- d. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
- e. Kerjasama dengan NAKES TNI/POLRI

Ketersediaan Sarpras Pendukung Pengendalian MPK

1. Telah Tersedia Vaksin PMK 8,3 juta Dosis Jika Habis Akan didatangkan Kembali (sesuai kebutuhan)
2. Telah Tersedia Obat-obatan PMK Antibiotik, Analgesik, Antihistamin, Vitamin Anti Inflamasi dan Desinfektan *Sumber Dana APBN dan APBD
3. Telah Tersedia SARPRAS Sputit, Cool Box, Cool Room (Bank Vaksin) Alat Pelindung Diri (Spatu, Masker, Apron) *Sumber Dana APBN dan APBD

Situasi PMK di Jawa Timur Tahun 2023

Sebanyak 34 Kab/Kota yang telah ber status ZERO REPORTED CASE Penyakit PMK Sedangkan sisanya 4 Kab/Kota masih berstatus Zona Merah.

Sebaran Kasus PMK di Jawa Timur

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KASUS	MATI	POTONG BERSYARAT	SEMBUH	SISA SAKIT
1.	Bangkalan	6.485	19	1	6.465	0
2.	Banyuwangi	2.386	6	10	2.370	0
3.	Batu	5.072	962	114	3.996	0
4.	Blitar	7.660	44	6	7.610	0
5.	Bojonegoro	3.667	209	109	3.349	0

6.	Bondowoso	6.195	35	55	6.105	0
7.	Gresik	6.306	274	23	6.009	0
8.	Jember	14.329	154	16	14.159	0
9.	Jombang	8.398	249	292	7.857	0
10.	Kediri	2.943	46	13	2.884	0
11.	Kota Blitar	446	1	0	445	0
12.	Kota Kediri	340	6	0	334	0
13.	Kota Madiun	135	7	70	58	0
14.	Kota Malang	444	3	164	277	0
15.	Kota Mojokerto	8	0	0	8	0
16.	Kota Pasuruan	57	0	3	54	0
17.	Kota Probolinggo	987	15	4	967	1
18.	Lamongan	3.755	60	44	3.651	0
19.	Lumajang	11.467	167	73	11.227	0
20.	Madiun	28	0	0	28	0
21.	Magetan	3.832	37	18	3.777	0
22.	Malang	20.307	389	403	19.515	0
23.	Mojokerto	5.579	65	101	5.413	0
24.	Nganjuk	6.204	56	14	6.111	
25.	Ngawi	2.832	45	4	2.783	0
26.	Pacitan	636		16	586	0
27.	Pamekasan	7.156	12	31	7.113	0
28.	Pasuruan	10.821	256	69	10.496	0
29.	Ponorogo	12.474	493	747	11.234	0
30.	Probolinggo	14.938	195	14	14.712	
31.	Sampang	5.367	55	11	5.301	0
32.	Sidoarjo	2.661	76	124	2.456	5
33.	Situbondo	4.842	229	1	4.612	0
34.	Sumenep	6.468	9	0	6.459	0
35.	Surabaya	34	0	0	34	0
36.	Trenggalek	2.156	36	79	2.041	0
37.	Tuban	9.667	122	9	9.536	0
38.	Tulungagung	2.940	49	69	2.822	0
TOTAL		200.022	4.415	2.707	192.854	

Realisasi Vaksinasi PMK Jawa Timur Periode 25 Juni 2022 s/d 06 September 2023

- a. Alokasi vaksin sebanyak: 8.264.350 dosis
- b. Realisasi sebanyak: 7.918.107 dosis (95%)

Kinerja Vaksinasi PMK di Jawa Timur

Jumlah Vaksinasi PMK 19 Oktober 2023

- a. Sapi Potong: 4.174.895 dosis
- b. Sapi Perah: 390.927 dosis
- c. Kerbau: 7.092 dosis
- d. Kambing: 2.545.852 dosis
- e. Domba: 738.367 dosis, dan
- f. Babi: 60.974 dosis Babi : 60.974 dosis

Total Capaian Vaksinasi PMK di Jawa Timur:

- a. Tahun 2022 adalah sebanyak 2.532.879 dosis
- b. Tahun 2023 (1 Jan sd 19 Okt 2023) adalah sebanyak 5.386.567 dosis

Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur terkait PMK.

1. Kekurangan tenaga medis dalam membantu melakukan vaksin ternak
2. Capaian vaksinasi ternak Jawa Timur 95% namun daerah perbatasan Jawa Tengah tingkat vaksinasinya rendah, sehingga kemungkinan penyebaran kembali PMK sangat besar.
3. Setelah PMK melanda masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi ternaknya.
4. Produksi susu di Jawa Timur pasca ternak terkena PMK.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kebun Raya Mangrove Surabaya

Kota Surabaya memiliki Hutan Mangrove yang berada disepanjang pesisir Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), dimana kawasan ini masuk dalam kawasan konservasi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hutan Mangrove memiliki fungsi sangat penting bagi lingkungan hidup. Di antaranya sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut agar tidak mengikis tanah daratan di garis pantai. Hutan mangrove juga memiliki

peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain binatang laut, juga terdapat jenis binatang darat lainnya seperti kera dan burung. Hal yang paling esensial dari tumbuhan mangrove adalah fungsinya sebagai penghasil oksigen (O₂) dan penyerap gas karbondioksida (CO₂) yang merupakan gas beracun serta sebagai pencegah terjadinya abrasi. Merujuk pada fungsi tersebut, Surabaya beruntung memiliki kawasan hutan mangrove yang luas. Sebab, tidak banyak kota di Indonesia maupun di dunia yang memiliki hutan mangrove seperti Kota Surabaya.

Kebun Raya Mangrove Surabaya terletak di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Gunung Anyar yang meliputi *Mangrove Information Center* (MIC), Gunung Anyar dan Medokan Sawah yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Walikota dengan nomor 188.45/120/436.1.2/2015 tentang penggunaan lahan di gunung anyar, SK Walikota dengan nomor: 188.45/145/436.1.2/2018 tentang penetapan lokasi kebun raya mangrove dan SK Walikota dengan nomor: 188.45/436.1.2/2019 tentang pengembangan kebun rata mangrove dan taman hutan raya kota Surabaya.

Kebun Raya Mangrove ini berada di kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya. Kebun Raya Mangrove Surabaya memiliki total luas lahan 31,5 hektar yang terdiri dari:

1. Di Gunung Anyar seluas 11 hektar sesuai SK Wali Kota dengan nomor 188.45/120/436.1.2/2015 tentang penggunaan lahan di Gunung Anyar.
2. Di Medokan Sawah: 16 hektar sesuai dengan SK Wali Kota dengan nomor: 188.45/145/436.1.2/2018 tentang penetapan lokasi kebun raya mangrove, dan
3. Di *Mangrove Information Center* (MIC) seluas 4,5 hektar sesuai dengan SK Wali Kota dengan nomor: 188.45/436.1.2/2019 tentang pengembangan Kebun Raya Mangrove dan Taman Hutan Raya Kota Surabaya yang merupakan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam perkembangannya, Kebun Raya Mangrove Surabaya telah memiliki beberapa produk seperti dokumen Amdal Pembangunan dan Infrastruktur pendukung, penelitian kucing bakau, keikutsertaan dalam lomba Kehati, penanaman 280.000 mangrove dan 57 jenis mangrove yang saat ini sedang dalam penambahan jenis dan koleksi melalui kegiatan eksplorasi, serta pembuatan buku Katalog dan buku Refleksi Kebun Raya Mangrove Surabaya.

UPTD Kebun Raya Mangrove Surabaya

Visi: Menjadikan UPTD Pengembangan Prasarana Kebun Raya Mangrove sebagai pionier pengembangan sumber pangan dalam ekosistem mangrove.

Misi: Meningkatkan mutu dan hasil produksi budidaya mangrove 1. Mengelola kebun raya mangrove secara berkelanjutan 2. Mengembangkan pemanfaatan mangrove sebagai sumber pangan alternatif.

Kedudukan: UPTD Pengembangan Kebun Raya Mangrove berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengembangan Sumber Pangan.

Fungsi: UPTD Kebun Raya Mangrove Surabaya menyelenggarakan fungsi:

1. Peningkatan mutu dan hasil produksi budidaya mangrove.
2. Pengelolaan Kebun Raya mangrove secara berkelanjutan.
3. Pengembangan pemanfaatan mangrove sebagai sumber pangan alternatif.
4. Pusat informasi mangrove.

Koleksi Mangrove Di Kebun Raya Mangrove Surabaya

Selain memenuhi fungsi-fungsi tersebut, salah satu alasan yang memenuhi syarat mangrove di Surabaya bisa menjadi kebun raya adalah keanekaragaman hayatinya tinggi. Dari 140 jenis tanaman mangrove di dunia, Surabaya punya 57 jenis. Di antaranya ada Avicennia Marina, Indian Mangrove atau Api-api Ludat, Avicennia Alba atau Api-Api Putih, Apple Mangrove atau Pidada Merah, Perepat Laut, Bakau Hitam, Bakau Merah, Daruju, Paku Laut, Tapak Kuda dan masih banyak jenis lainnya. Kebun Raya Mangrove Surabaya akan terus berupaya memperbanyak jenis koleksinya.

Jumlah Tanaman Mangrove Di Kebun Raya Mangrove Surabaya

Jumlah Tanaman Mangrove di Kebun Raya Mangrove Surabaya

NO.	NAMA TANAMAN LATIN	NAMA TANAMAN LOKAL	Sejati & Non Sejati	Jumlah Tahun 2023
1	Rhizophora Mucronata Poir.	Tinjang/Tanjang	Mayor	225.173
2	Rhizophora Stylosa Griff.	Tanjang		16.451
3	Rhizophora Apiculata Blume	Merah/Bakau		2.136
4	Bruguiera Gymnorhiza (Lour.) Lam	Putut/Lindur		13.421
5	Bruguiera Cylindrica Blume	Werus		16.111
6	Bruguiera Sexangula (Lour.) Poir.	Mata Busaya		113
7	Bruguiera Paviflora Wight & Arn. ex W. Griffith	Putut Putih		271
8	Avicennia Marina var. rumphianna (Hallier f.) Bakh.	Api-Api		1.700.049
9	Avicennia Lanata Ridley	Kateng		1.600.047
10	Avicennia Officialis L.	Api-Api Ludat		521
11	Avicennia Alba Blume	Api-Api Putih		6.621
12	Sonneratia Caseolaria Engl.	Bogem		1.011
13	Sonneratia Ovata Backer	Prapat		2
14	Sonneratia Alba Sm.	Pidada		1
15	Nypa Fruticans Wurm	Buyuk/Nipah		362
16	Cerops Decandra (Griff) W. Theob	Luru		1.789
17	Ceriops Tagal C. B. Rob.	Mentigi		1.772
18	Lumnitzera Racemosa Wild	Keduduk		582
19	Xylocarpus Mollucensis M. Roem.	Nyirih	Minor	1.027
20	Xylocarpus Granatum J. Koenig	Nyirih		526

NO.	NAMA TANAMAN LATIN	NAMA TANAMAN LOKAL	Sejati & Non Sejati	Jumlah Tahun 2023
21	Xylocarpus Rumphii (Kostel.) Mab.	Nyirih	Minor	27
22	Aegiceras Corniculatum	Gedang Gedangan		472
23	Excoecaria Agallocha L.	Buta-Buta/Manengen		11.981
24	Hibiscus Tiliaceus	Waru Laut	Asosiasi / Mangrove Tambahan	8
25	Acanthus sp	Jeruja Hitam		1.487
26	Acanthus ebracteatus Vahl	Jeruja		1.356
27	Derris Trifoliata Lour.	Ketower		6.389
28	Acrosticum Aerum L.	Paku Laut		11.715
29	Acrosticum Specifium Wild.	Paku laut		10.872
30	Sesuvium Portulacastrum (L.) L.	Alur Kecil		10.592
31	Sesuvium Sp.	Alur Kebo		9.769
32	Ziziphus Mauritiana Lam.	Bidara		143
33	Thepesia Populnea Sol. Ex Corea	Waru Lot		54
34	Terminalia Catappa L.	Ketapang		326
35	Carbera Manghas L.	Bintaro		471
36	Ipsimona per-caprae (L.) Kuhn	Kangkang Laut/Tapak Kuda		6.057
37	Ruellia Tuberosa L.	Pietekan		10.591
38	Melampodium Paludosum DC.	Serunen		11.497
39	Calophyllum Inophyllum L.	Nyampung		188
40	Stachytarpheta Jamaicensis (L.)	Kretek		9.660

Lima Fungsi Kebun Raya Dan Fungsi Sumber Pangan Alternatif

Kebun Raya Mangrove Surabaya merupakan kebun raya tematik pertama dan satu-satunya di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan mangrove di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 93 tahun 2011 tentang perkebunrayaan, bahwa kebun raya harus memiliki beberapa syarat:

Pertama, lokasi tanahnya harus *clear and clean*. Artinya tidak bermasalah. Kebun Raya Mangrove di Surabaya di Gunung Anyar ini tanahnya *clear and clean*. Dibuktikan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa ini lahan hijau. Ada Perwali dengan penetapan sebagai kebun raya dan penetapan digunakan untuk kebun raya mangrove. Itu syarat bukti bahwa kebun raya mangrove ini *clear and clean* untuk aset tanahnya.

Kedua, harus ada pengelola. Pemkot Surabaya sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Mangrove Surabaya berdasarkan Perwali 41 tahun 2023. Ada kantornya, lobi, auditorium, dan merchandiser.

Ketiga, mempunyai kawasan zona. Ada zona penerima. Seperti adanya gerbang, tempat parkir, dan tempat tiket. Lalu, zona koleksi. Harus punya koleksi yang sesuai standar BRIN. Ada bukti koleksinya apa saja, jenis, dan detailnya yang harus dimasukkan ke dalam data yang itu harus diverifikasi BRIN dan teregister. Kemudian zona pengelola. Di mana ada kantornya, termasuk ada lobi, auditorium, dan *merchandiser*.

Untuk mengembangkan kawasan mangrove di Surabaya sebagai kebun raya, ada lima fungsi yang harus dipenuhi. Yaitu fungsi edukasi, fungsi penelitian, fungsi wisata, fungsi konservasi, dan fungsi jasa lainnya. Maksud dari jasa lainnya seperti meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebagai fungsi edukasi (pendidikan), Kebun Raya Mangrove Surabaya merupakan 'laboratorium alam' bagi dilaksanakannya kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Fungsi riset (penelitian), Kebun Raya mangrove Surabaya merupakan pusat penelitian yang telah diakui eksistensinya dan menjadi referensi internasional dalam aspek botani dan ilmu turunannya.

Kemudian Kebun Raya Mangrove Surabaya juga memenuhi fungsi wisata. Konsep wisata yang perlu dikembangkan di dalam kebun raya lebih menekankan pada nilai ilmiah. Juga fungsi konservasi yang berkaitan dengan kelestarian tumbuhan mangrove.

Untuk fungsi jasa lainnya yang berkaitan dengan ekonomi, bisa dilihat dengan pengolahan hasil tanaman mangrove menjadi bahan pewarna alami, batik, sabun, kosmetik, lulur, dan berbagai jenis lainnya. Ini membuat ekonomi masyarakat bergerak. Ada banyak warga yang bisa hidup (mendapatkan tambahan penghasilan) dari sini.

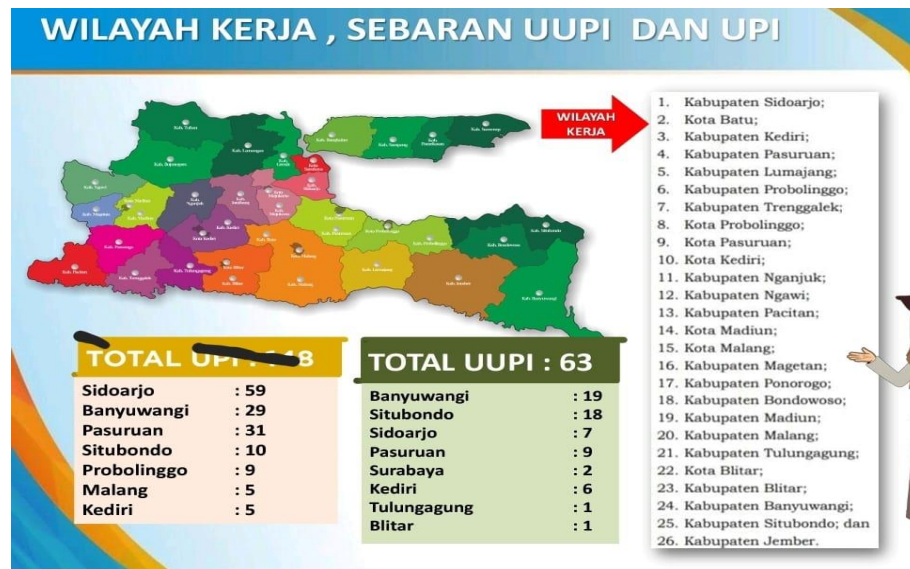
Selain lima fungsi yang disyaratkan BRIN, karena di domain pertanian, DKPP Surabaya juga menekankan Kebun Raya Mangrove Surabaya tidak hanya untuk menghijaukan kota dan menurunkan iklim, tetapi juga sebagai bahan pangan atau sumber bahan pangan alternatif.

2. Balai Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I

Pada saat kunjungan Tim komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai tugas Balai Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Adapun Wilayah kerja dari BPMKHP Surabaya adalah:

- a. *Juanda Airport*: Terminal Penumpang (T1) Domestik dan Internasional, Terminal Domestik dan Internasional, Terminal Penumpang (T2) Domestik dan Internasional, Regulated Agent Bandara Juanda

- b. Wilker Malang: Terminal Penumpang Domestik, Terminal Kargo Domestik
- c. Wilker Jember: Terminal Penumpang Domestik, Terminal Kargo Domestik
- d. Wilker Banyuwangi: Terminal Penumpang Domestik dan Internasional, Terminal Kargo Domestik dan Internasional, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Tanjungwangi



Adapun prioritas kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2023 antara lain:

- a. Penerapan sistim jaminan kesehatan ikan, mutu dalam implementasi Quality Assurance kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan Hulu-Hilir. Dilaksanakan dengan pemenuhan persyaratan standar biosecurity dan jaminan mutu pada kawasan budi daya, pelabuhan; pengawasan dan layanan sertifikasi kesehatan untuk ekspor, impor dan domestik di bandara, pelabuhan, dan pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 20217; Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); surveilans konsistensi penerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan; serta penerapan traceability pada Unit Pengolahan Ikan.
- b. Pengembangan laboratorium referensi, akreditasi laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi, serta sertifikasi.
- c. Penguatan sarana dan prasarana pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan.

Adapun realisasi PNBPNP hingga bulan September 2023 adalah Rp 5.469.890.212 dari target 2023 sebesar Rp7.438.121.000. Selengkapnya dapat terlihat pada gambar berikut:



Selanjutnya, disampaikan bahwa pengiriman ekspor ikan dan hasil laut lainnya antara lain berupa Udang Vaname, Tuna, Cakalang, Rumput Laut, Kerupuk Udang, Benih Kerapu, Benih Bandeng, hingga Benih Kakap, dengan negara tujuan ekspor USA, Jepang, Saudi Arabia, Singapura, hingga Malaysia. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Terdapat catatan yang terungkap pada saat kunjungan adalah, pasca terbentuknya Badan Karantina Indonesia, maka akan ada penyesuaian aset dan pegawai yang akan dialihkan pada Badan Karantina Ikan atau Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP. Dengan adanya penyesuaian yang ada perlu dipertimbangkan aspirasi tiap pegawai terkait pilihan perpindahan ke dalam dua badan sesuai keahlian yang dimiliki.

3. Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya

Institusi ini pada mulanya bernama Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (BPPMK) didirikan di Wonocolo Surabaya berdasar kepada surat keputusan Menteri Pertanian Tanggal 12 September 1952 No. 92/Um/52.

BPPMK ini mempunyai tugas utama memproduksi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk keperluan Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu BPPMK dijadikan sebagai Regional Reference Laboratory untuk penelitian dan diagnostik PMK di Asia Tenggara. Nama BPPMK mengalami perubahan nama pada tahun 1955 menjadi Lembaga Penyidikan Penyakit Mulut dan Kuku (LPPMK). Pada tanggal 24 Juni 1959 kemudian berubah lagi menjadi Lembaga Penyakit Mulut Kuku yang diresmikan oleh Menteri Pertanian Mr. Sadjarwo dengan didampingi Direktur LPMK Dr. FK. Waworoentoe.

Selanjutnya, pada tanggal 10 April 1967 Lembaga ini berubah nama lagi menjadi Lembaga Virologi Kehewanuan (LVK) yang diresmikan oleh Menteri Pertanian Kabinet Ampera Major Djenderal TNI Sutjipto SH dengan didampingi Direktur Lembaga Prof. Dr. R. Tanjung Adiwinata. Lembaga ini bertugas tidak hanya menangani Penyakit virus PMK tetapi juga menangani penyakit-penyakit hewan lainnya seperti New Castle Disease (Tetelo) dan Rabies (Anjing Gila). Pada tanggal 22 September 1978 LVK berubah menjadi Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA) berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 317/Kpts/Org/5/1978 tanggal 25 Mei 1978 yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan penyaluran Vaksin, Antisera, Diagnostika dan Bahan Biologis lain dalam rangka penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pusvetma menjadi Satker PK Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 55/KMK.05/2010 pada tanggal 5 Februari 2010, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 Institusi ini menjadi Pusat Veteriner Farma yang mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lainnya.

Untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien, maka pada tanggal 23 Desember 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan. Adapun pada tanggal 17 Januari 2023 Pusat Veteriner Farma berubah menjadi Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma berdasar Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan baku, produksi, pengujian, pemasaran, distribusi dan peningkatan mutu obat hewan.

Pada tahun 2006 Pusvetma mendapatkan Sertifikat SNI ISO/IEC 17025 : 2008 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-293-IDN serta sudah update ke SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 2 Januari 2019, selain itu Pusvetma juga mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2008 pada bulan November 2012 dan telah update ke ISO 9001:2015 pada 3 Desember 2018. Selain itu Pusvetma juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 dengan nomor akreditasi LSSMAP-001-IDN sejak 3 Desember 2018 dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi dari berbagai aspek sesuai Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016.

Tim Komisi IV menilai, PUSVETMA masih harus meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk kapasitas SDMnya jika ingin bekerja optimal mencari/memproduksi vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit hewan. Berkaitan dengan percepatan penanganan penyakit rabies, Komisi IV DPR RI menyarankan agar melibatkan/kerja sama dengan pihak kampus. Misalnya, diberikan kredit poin bagi mahasiswa koas yang sudah memvaksin rabies sejumlah hewan. Pada saat kunjungan, Tim Komisi IV DPR RI meninjau seluruh sarana dan prasarana PUSVETMA. Beberapa hal yang terungkap diantaranya adalah, PUSVETMA mengalami kesulitan memproduksi vaksin *African Swine Fever* (ASF), dikarenakan dari jenis virusnya. Obat yang diproduksi belum stabil dan saat ini masih dalam tahap pengembangan untuk menjadi vaksin. Untuk penyakit *African Swine Fever* (ASF) PUSVETMA belum memiliki ilmu/rekayasa genetiknya. Saat ini proteksinya masih 50%. Kelemahannya adalah, virusnya cepat bermutasi. Komisi IV DPRI meminta untuk terus melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya meminta untuk disusun konsep dan rencana pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit *African Swine Fever* (ASF), yang menggambarkan dengan jelas kebutuhan anggaran, upaya

pengembangan sarana dan prasarana, termasuk pengembangan kapasitas SDM (menyekolahkan staf PUSVETMA). Sebagai contoh salah satu kebijakan PUSVETMA memproduksi master sheed, dimana untuk isolat AI harus diperbaharui. Berkaitan dengan produksi vaksin/obat *African Swine Fever* (ASF), Komisi IV DPR RI meminta agar pada tahun 2024 proteksinya meningkat menjadi diatas 50%

Selain melakukan kunjungan lapangan, Tim Komisi IV DPR RI juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai stakeholder. Beberapa hal yang disampaikan diantaranya perkembangan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku per Oktober 2023. Disampaikan bahwa serapan vaksin PMK baru 51% cakupannya. Diduga salah satu penyebabnya adalah, tingkat minat/intensitas masyarakat melakukan vaksin sudah mulai berkurang. Untuk itu Tim Komisi IV meminta terus dilakukan sosialisasi untuk vaksinasi, dan melakukan vaksinasi massal. Hal lain yang terungkap dalam diskusi adalah, berkaitan dengan status penyakit hewan, diperlukan dukungan untuk melakukan revisi UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena undang-undang lama dinilai sudah tidak relevan. Dimana penyakit hewan semakin berkembang, dan bermutasi. Secara khusus disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, untuk menambah vaksin PMK sebanyak 1 juta dosis untuk Provinsi Jawa Timur. Secara umum disimpulkan, agar presentase capaian vaksinasi antar daerah sama-sama tinggi, perlu diperhatikan kecepatan pelaksanaan vaksin.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah, terkait dampak PMK terhadap sapi perah. Saat ini kondisi peternakan sapi perah di Jawa Timur dalam kondisi mengkhawatirkan, untuk terdapat aspirasi untuk mempertimbangkan penggantian betina produktif sapi perah yang tidak berasal dari Jawa Tengah.

Beberapa tanggapan dari diskusi diantaranya, agar pemerintah jangan lupa membayar vaksin kepada peternak. Selain itu terkait sapi perah, diketahui Pemerintah sedang mencari sumber lain diluar New Zealand, yang saat ini sedang menahan eksportasi sapi perah. Saat ini Pemerintah sedang mencoba mengembangkan sapi perah tropis, yang meskipun produksi tidak terlalu tinggi namun dari segi biaya produksi, cocok dengan karakteristik peternak Indonesia. Pada saat pertemuan juga disinggung mengenai pasokan pangan

utamanya beras dan jagung. Secara umum pasokan untuk Jawa Timur mencukupi. Catatan kritis pada tingginya harga jagung yang menjadi Rp6000 per kilo yang berdampak pada tingginya harga pakan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan terhadap komoditas jagung untuk pakan agar didorong penugasan kepada Badan Pangan Nasional, karena harga pangan tinggi. Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana memastikan realisasi beras SPHP/atau kegiatan Gerakan Pasar Murah harus menggunakan SPHP.

Menanggapi beberapa hal di atas, Tim Komisi IV menyampaikan dalam upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) harus ada *lesson learn* dimana Provinsi Jawa Timur sebagai contoh pembelajaran bagi provinsi lain. Selain itu, vaksin yang diproduksi jangan sampai kadaluarsa. Berkaitan dengan komoditas ternak sapi perah, perlu ada *stamping out* bagi ternak yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), mengingat anggaran tersedia. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyusun *road map* upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain itu, Pemerintah agar mendistribusikan vaksin 1 juta dosis kepada Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang diminta, serta meminta Kementerian Pertanian untuk menghabiskan vaksin melalui vaksinasi massal sebelum masa kadaluarsa. Untuk antisipasi/mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu diperkuat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, harus ada penguatan Karantina di setiap provinsi dan lintas batas antar provinsi maupun negara.

Menanggapi permasalahan pangan, perlu ada solusi khususnya terkait tingginya harga jagung, diantaranya melalui penugasan oleh Perum Bulog. Kepada Badan Pangan Nasional, harus mampu melihat/melakukan pemetaan sejauhmana kebijakan yang dilakukan pemerintah berpengaruh terhadap harga, serta memetakan berapa stok pangan diluar stok yang dikuasai Pemerintah, sehingga harga bisa dikendalikan. Catatan kritis dikemukakan oleh Tim Komisi IV DPR RI, yang menilai adanya inkonsistensi/paradoks kebijakan antara upaya pemenuhan kebutuhan pangan melalui pengembangan pangan lokal dengan pelaksanaan kebijakan impor pangan.

Untuk itu, perlu ada regulasi dan tata kelola untuk mengatasi hal tersebut. Menjawab catatan dari Tim Komisi IV DPR RI, disampaikan oleh Pemerintah bahwa Badan Pangan Nasional saat ini sedang melakukan survey stok beras, yang akan menjadi basis data stok tahun 2024, serta membutuhkan dukungan regulasi/kebijakan untuk pengembangan keanekaragaman pangan. Terkait dengan masalah harga jagung, sudah ada penugasan kepada Perum Bulog mengenai Jagung untuk pakan di awal November 2023, dimana diberikan subsidi Rp1000, sehingga peternak membayar Rp5000. Menutup kegiatan kunjungan dan diskusi, Komisi IV DPR RI mengingatkan bahwa negara harus hadir dalam mengatasi permasalahan pangan, serta harus ada sinkronasi data yang valid agar *clean and clear*.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, didapatkan berbagai catatan sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (persero) dan ID Food untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam rangka menjaga pasokan pangan dengan harga yang terjangkau, serta dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia,
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan ID Food untuk menindaklanjuti temuan dan hal-hal yang menjadi masukan dan aspirasi dari masyarakat
3. Komisi IV DPR RI mengapresiasi keberadaan Kebun Raya Mangrove Surabaya dan mendorong untuk terus memperbanyak jenis koleksi mangrovenya.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah cq Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar vaksinasi ternak dilakukan secara merata diseluruh Indonesia terutama daerah-daerah, diantaranya melalui vaksinasi massal

5. Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk melakukan upaya konkrit mengenai pencegahan penyakit hewan melalui peningkatan mutu vaksin, vaksinasi, *bio security* maupun tindakan medis lainnya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyusun *road map* upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk terus melakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk memproduksi vaksin/obat penyakit *African Swine Fever* (ASF), serta Kementerian agar menyusun konsep dan rencana pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit *African Swine Fever* (ASF), yang menggambarkan dengan jelas kebutuhan anggaran, upaya pengembangan sarana dan prasarana, termasuk pengembangan kapasitas SDM (menyekolahkan staf PUSVETMA).
8. Berkaitan dengan produksi vaksin/obat, Komisi IV DPR RI meminta agar tingkat proteksi vaksin/obat penyakit *African Swine Fever* (ASF) pada tahun 2024 meningkat menjadi diatas 50%
9. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan, program SPHP dan berkordinasi dengan penegak hukum jika ditemukan adanya penyelewengan penyaluran/penjualan beras SPHP
10. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menekan harga jagung pakan ternak yang saat ini peternak membeli jagung pakan dengan kisaran harga mencapai Rp.7.000/kg.

V. PENUTUP

Demikian Laporan kegiatan Kunjungan Kerja Reses yang dilakukan Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya, ke Balai Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan Hasil Kelautan, dan Perikanan, ke Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) dan mendengarkan peningkatan produksi hewan ternak yang berkualitas dan bebas penyakit dalam

mendukung pemenuhan pangan berbasis protein. Berdasarkan temuan, aspirasi, permasalahan, perkembangan, dan informasi yang diperoleh terkait dengan lokasi tersebut, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Komisi IV DPR RI. Diharapkan, Kunjungan Kerja Reses ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Oktober 2023

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Anggia Ermarini, M.KM.

A-14

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN LIPUTAN MEDIA

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47142/t/Hilirisasi+Produk+Mangrove+Jadi+Alternatif+Dongkrak+Ekonomi+dan+Gizi+Masyarakat>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47141/t/Usulan+Impor+Sapi+Perah+Harus+Ditunda+Sampai+Ada+Penyelesaian+Komprehensif+PMK>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47140/t/Kesehatan+Hewan+Tidak+Sekadar+Tak+Berpenyakit+tapi+Kemampuan+Capai+Produktivitas+Tertinggi>

https://www.instagram.com/reel/Cyw2_zXvRzy/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==